

LAPORAN PENELITIAN

**ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN
SUNGAI BANJIR KANAL PADANG DALAM RANGKA
BANTUAN O E C F JEPANG**

OLEH : 1. FIRMAN HASAN, SH. LLM (*Ketua Pelaksana*)
2. NAJMI, SH. MH (*Anggota*)
3. ZAINUL DAULAY, SH (*Anggota*)
4. MAGDARIZA, SH (*Anggota*)
5. MARADANIS, SH (*Anggota*)
6. SYOFIRMAN SYOFYAN (*Anggota*)



Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian
UNIVERSITAS ANDALAS Dibiayai dengan Dana Proyek
Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Andalas
1992 / 1993

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Permasalahan

Kotamadya Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas 695 Km², dibatasi oleh Bukit Barisan di sebelah Timur dan Selatan, Daratan Anai di sebelah Utara serta di sebelah Barat oleh Lautan Hindia. Pertambahan penduduk 3,1% per tahun. Musim hujan biasanya antara bulan Oktober sampai bulan Desember, dengan rata-rata hujan 4,200 mm per tahun, temperatur 26° C kelembaban 83% dan penguapan 1,500 mm per tahun.

Berdasarkan topografinya, Kotamadya Padang pada ketinggian 1 m sampai 1.800 m di atas permukaan laut. Dibagian tengah merupakan daerah dataran dengan 5 km dari daerah pantai kearah Timur dan 10 Km ke arah yang menanjak sampai ketinggian 1.800 m.

Daerah dimana Kota ini terbentuk adalah yang dibentuk oleh tiga aliran sungai dan tiga anak sungai yang bermuara saling berdekatan di Lautan Hindia, yaitu: Batang Arau dengan anak sungainya Batang Jirak di Bagian Selatan, Batang Kuranji dengan anak sungainya Sungai Laras dan Sungai Belimbing di Bagian Tengah Batang Air Dingin di Bagian Utara. Luas daerah tangkapan hujan masing-masing 172 Km², 213 Km², dan 131 Km². Dengan keadaan muara sungai dan daerah tangkapan hujan yang saling berdekatan, maka terjadinya banjir cenderung selalu dalam waktu yang bersamaan.

Penanggulangan banjir di Kotamadya Padang telah terlaksana sejak tahun 1981, dengan mengalihkan sebagian aliran banjir Batang Arau di Lubuk Begalung

ke sistim Banjir Kanal sepanjang 8,80 Km yang bermuara di Lautan Hindia dengan maksud melindungi perdagangan dan pemukiman.

Dengan adanya perkembangan sarana perkotaan dan perkembangan penduduk yang menempati dataran rendah, sehingga daerah yang sebelumnya menjadi tempat penampungan air sementara dari luapan banjir Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin menjadi berkurang. Akibatnya fasilitas pengendalian banjir yang ada, tidak memenuhi persyaratan lagi, sehingga Kotamadya Padang setiap tahunnya selalu dilanda banjir akibat luapan air sungai ataupun akibat hujan lokal.

Perubahan tataguna lahan pada daerah tangkapan hujan mengakibatkan debit menjadi besar yang jika pada saat bersamaan bertemu dengan pasang surut yang naik akan menyebabkan genangan banjirpun akan bertambah luas. Daerah yang cenderung kena genangan air seluas 3500 Ha (35 Km²) terdiri dari daerah pemukiman dan perkantoran seluas 1600 Ha, persawahan 1500 Ha, dan sarana lainnya 400 Ha.

Kotamadya Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat berfungsi sebagai pusat perdagangan ataupun perekonomian, perkantoran, pemukiman serta pariwisata dan juga merupakan pintu gerbang dari propinsi itu sendiri yang terdiri dari sebelas kecamatan, terus melaksanakan pembangunan diselala bidang kehidupan.

Agar fungsi tersebut terlaksana dengan baik, dan perkembangan pembangunan dapat berjalan lancar, maka Kotamadya Padang haruslah bebas dari banjir. Namun dalam kenyataannya Kotamadya Padang termasuk daerah rawan banjir. Untuk mengatasinya, pemerintah sedang membangun proyek yang bertujuan untuk mengendalikan banjir di Kota Padang, untuk jangka pendek yaitu Padang Area Flood Control Project I.

Padang Area Flood Control Project I ini yang perkerjaanya telah mulai dilaksanakan sejak awal tahun

1990 yang lalu adalah meliputi beberapa pekerjaan yakni:

1. Perbaikan Sungai Batang Arau	4500 m
2. Perbaikan Sungai Batang Jirak	2300 m
3. Perbaikan Drainase Olo Nipah	6800 m
4. Perbaikan Drainase Ujung Gurun	560 m
5. Perbaikan Drainase Purus	510 m
6. Perbaikan Drainase Ulak Karang	790 m

Dari tujuh pekerjaan perbaikan di atas, terlihat dimana perbaikan dan normalisasi Banjir Kanal adalah pekerjaan terbesar yakni sepanjang 6800 m yang otomatis merupakan pekerjaan yang akan menghabiskan dana terbesar dibanding pekerjaan perbaikan lainnya.

Untuk melaksanakan proyek pengendalian banjir ini pemerintah dalam fungsinya sebagai "agent of development" memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang besar. Karena masih merupakan negara yang sedang berkembang tentu saja pemerintah Indonesia perlu mengadakan kerjasama dengan negara-negara maju maupun lembaga-lembaga keuangan Internasional, untuk meringankan biaya pembangunan tersebut. Kerjasama tersebut dapat berupa bantuan luar negeri, seperti pinjaman modal, bantuan teknik ataupun skill dan lain-lainnya.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988 diamanatkan bahwa, bantuan luar negeri sebagai pelengkap dana pembangunan dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan politik, syarat-syaratnya tidak memberatkan, dalam batas kemampuan untuk membayar kembali serta kegunaannya untuk proyek yang diberikan prioritas produktif dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Salah satu bantuan yang dianggap pemerintah memenuhi kriteria seperti yang dimaksud di atas adalah bantuan Jepang dalam pelaksanaan Padang Area Flood

BAB VI

HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan " Loan Agreement No. IP-360, dated December 14, 1990, between The Overseas Economic Cooperation Fund And The Republic of Indonesia " dari sudut Hukum Perjanjian Internasional.

Dalam Hukum Perjanjian Internasional dikenal beberapa istilah yang digunakan untuk perjanjian Internasional, misalnya Convention, Traktat, Declaration, Agreement dan lain-lain, yang semuanya berarti Perjanjian Internasional.

Perjanjian kerjasama keuangan antar pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia ini dituangkan dalam suatu Agreement yang disebut Loan Agreement.

Agreement merupakan suatu bentuk perjanjian Internasional yang sifatnya tidak resmi dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat teknis dan administratif yang ditandatangani oleh wakil-wakil Departement Pemerintah dan tidak memerlukan ratifikasi.

Ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional, maka Loan Agreement ini tunduk pada ketentuan Konvensi Hukum Perjanjian Internasional 1969 (Vienna Convention on The Law of Treaties 1969), yaitu sesuatu dengan pasal 1 Konvensi ini, yang berbunyi :

" Konvensi ini berlaku pada perjanjian antar negara ", Jepang sebagai negara pemberi pinjaman kepada Indonesia memberikan bantuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan pembangunan di Indonesia, sebagaimana yang disebut dalam Pembukaan Loan Agreement tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dipetik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Jika melihat tujuan dari Loan Agreement no. IP 362 yakni untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan pembangunan di Indonesia yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan perbaikan Sungai banjir kanal Padang ini, maka Perjanjian Internasional ini jelas memiliki itikad baik (good faith) sesuai dengan isi pasal 26 konvensi Wina 1969.
2. Hasil pelaksanaan perbaikan Sungai Banjir Kanal Padang sebagai salah satu perwujudan isi agreement ini turut menentukan apakah pihak Indonesia menghargai itikad baik dari pihak Jepang ataukah tidak. Untuk menunjukkan bahwa negara kita menghargai itikad baik ini maka mau tidak mau negara kita harus memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. ini berarti pelaksanaan perbaikan Sungai Banjir Kanal harus berhasil sesuai dengan keinginan pihak Jepang sebagai pemberi bantuan.
3. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan itu maka hendaklah setiap kebijaksanaan, aktifitas ataupun tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
4. Hingga saat ini proyek perbaikan Sungai banjir

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, SH . Tebaran pikiran tentang studi Hukum dan masyarakat, PT Media Sarana Press, 1987.
- H. Syamsul Bahri Dt.Saripado,SH. Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang, Fakultas Hukum UNAND, 1983
- Drs. H.S Syarif. Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja asing di Indonesia dan peraturannya, Sinar Grafika, 1992.
- Drs. Yunus Shamad. Pengupahan Pedoman bagi Pengelola Sumber daya Manusia di Perusahaan, PT Bina Sumber Daya Manusia, 1992.
- Suryono, Edi, SH. Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia. Bandung, CV.Remaja Karya, 1984.
- Wasito, SH. Hk. Konvensi-konvensi Wina - Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
- Buku Usulan Proyek Pengendalian Banjir Kota Padang. Kanwil Departemen Pekerjaan Umum, Sum-Bar.